PEREMPUAN, KEMISKINAN, DAN PARIWISATA[1]

Oleh:
Harendhika Lukiswara

> *"Saya mau, arah pembangunan Trenggalek fokus pada tiga hal. Pertama, pemberdayaan perempuan, termasuk disabilitas dan kelompok rentan. Kedua, desa wisata. Dan ketiga, infrastruktur."*
>
> (M. Nur Arifin, Bupati Trenggalek, dalam sambutan acara CSR Award, 11 November 2021)

Dadi wong wadon: dari peran domestik ke peran publik

Perempuan, dengan berbagai stigma yang menyertainya, adalah makhluk yang terus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Dalam bidang politik misalnya, keterwakilan perempuan terus ditingkatkan proporsinya. Begitu juga di sektor ekonomi, perempuan terus diberikan akses yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan.

Peningkatan akses perempuan di sektor ekonomi dan politik, seringkali masih terbentur budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai warga "kelas dua". "Masak, macak, manak" seakan menjadi stigma yang (masih) terus disandang perempuan hingga saat ini. Maka, aktivitas domestik sudah dilekatkan perepuan sejak lama hingga menjadi budaya dan adat istiadat.

Pandemi Covid-19, perlahan tapi pasti juga mempengaruhi perempuan. Belum lagi jika si suami berkurang pendapatannya bahkan kena PHK. Tak sedikit, mereka juga mengalami KDRT. Di Indonesia, 42% responden mengalami peningkatan frekuensi kekerasan (*abuse*) selama pandemi (Sastiono dkk, JPAL, dalam Zulfakhri Auzar, *Kemiskinan, Gender dan Covid-19 di Jatim,* 2020). Tekanan ekonomi yang dihadapi, membuat si suami sering melampiaskan kekesalannya pada pasangan. Bahkan, kasus perceraian juga meningkat selama pandemi. Belum lagi mengurus anak yang belajar secara daring. Beban perempuan akan semakin berat dari hari ke hari.

Beban perempuan selama pandemi ternyata tidak hanya dialami ibu rumah tangga. Mawar (bukan nama sebenarnya), yang sempat saya wawancarai juga mengeluhkan beban yang semakin berat. Sepulang kerja, ia masih harus mengerjakan peran-peran domestik seperti menyapu, mengepel, mengasuh anak hingga menggantikan peran guru untuk di rumah. Ia terus terang merasa keteteran. Sementara suaminya, enggan berbagi peran domestik di rumah dengan alasan tugas suami "hanya" mencari nafkah di luar rumah.

Berbagai kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa menjadi perempuan dalam budaya patriarkis itu tidak mudah. Padahal, dalam budaya Jawa menjadi ibu rumah tangga tidak menjadikan penghalang untuk berperan di ranah sosial. Menurut (Irfan Afifi, *Saya, Jawa, dan Islam*, 2019), mengemukakan bahwa peran domestik perempuan dalam budaya Jawa bukan berdiri dalam ranah yang tertutup (rumah tangga) – yang dalam kacamata feminisme barat dipandang sebagai ranah domestik dan dianggap sebagai simbul keterkungkungan peran perempuan untuk keluar di ranah publik. Dalam struktur sosiologi rumah tangga Jawa, justru kita temukan rumah tangga sebagai simpul penting menuju peran sosial yang lebih luas.

Rumah tangga sebenarnya jauh dari sangkaan orang yang merupakan ruang yang tak terpisah, alias terbuka dan tersambung dengan ruang sosial keberadaanya. Bagi masyarakat Jawa, ruang sosial (publik) merupakan perpanjangan tangan dari rumah tangga. Dengan argumentasi seperti itu, sudah seharusnya laki-laki dan perempuan tidak memiliki penolakan terhadap keikutsertaan perempuan untuk bekerja, bersekolah lebih tinggi, beraktivitas sosial di luar rumah, selama berjangkar dan merupakan perluasan peran domestik sosial rumah tangga.

Feminisasi Kemiskinan

Seluruh daerah, termasuk Trenggalek terguncang ekonominya akibat pandemi Covid-19. Sejak kasus pertama terdeteksi pada April 2020, sektor kesehatan dan ekonomi mengalami kontraksi. Terbukti,

[1] Tulisan ini juga terbit di Jurnal GERTAK Edisi Tahun 2021 dengan judul "Keberdayaan Gender: Solusi Feminisasi Kemiskinan? - diedit"

pada akhir 2020, pertumbuhan ekonomi Trenggalek minus 2,17 (BPS, 2021). Turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut juga seiring dengan naiknya angka kemiskinan menjadi 0,64% (masih dibawah rata-rata kenaikan kab./kota Jawa Timur). Sebelumnya, Trenggalek mencanangkan target angka kemiskinannya 1 digit. Namun, pandemi Covid-19 membuyarkan semuanya.

Peningkatan angka kemiskinan di Trenggalek, begitu juga Jawa Timur dan Indonesia, juga menimpa kelompok perempuan. Perempuan lebih rentan miskin daripada laki-laki terutama yang berperan sebagai kepala keluarga. Mereka juga lebih rentan mengalami kemiskinan yang panjang karena lebih sulit keluar dari jurang kemiskinan. Dan parahnya, cenderung mewariskan kemiskinannya ke anak-anak mereka (kemiskinan lintas generasi) (Chant, *Gender Generation and Poverty: Exploring the Feminization of Poverty in Africa, Asia and Latin Amerika*, 2007).

International Labour Office (2004) menyatakan bahwa kaum wanita miskin lebih menderita karena pada sebagian besar masyarakat, wanita juga menjadi subyek dari nilai-nilai sosial yang membatasi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi atau menikmati akses yang sama ke pelayanan umum. Di Indonesia, nilai-nilai yang diberlakukan dalam masyarakat dapat berupa pernikahan di usia muda, keharusan segera memiliki anak, kehamilan berkali-kali untuk memperoleh anak laki-laki, dan jam kerja yang panjang di rumah. Kondisi inilah yang semakin memperparah terjadinya feminisasi kemiskinan

Kemiskinan yang dialami perempuan erat kaitannya dengan kesetaraan dan keberdayaan gender. Kesetaraan gender yang dimanifestasikan dengan IPG dan keberdayaan gender yang dimanifestasikan dengan IDG secara bersama-sama berkorelasi dengan kemiskinan. Hasil penelitian SMERU (2020) di Jawa Timur membuktikan hal tersebut. Pandemi covid-19 ternyata tidak signifikan berpenbaruh terhadap IPG di Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2020, IPG Trenggalek justru mengalami kenaikan sebesar 0,19 tetapi IDG minus 0,75. Masih menurut SMERU, memang keterbangunan laki-laki (IPM laki-laki) lebih signifikan mengurangi kemiskinan daripada IPM perempuan. Hal inilah yang mendukung mengapa kenaikan IPG di Kabupaten Trenggalek belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Padahal, kenaikan kesetaraan perempuan diharapkan juga diikuti oleh kenaikan pendapatan, sesuatu yang menjadi faktor kritis di kala pandemi. Berbeda dengan IPG, perempuan yang berdaya yang dilihat dari indikator IDG harus mendapatkan perhatian pemerintah. Setiap kenaikan IDG sebesar 1 persen, akan mengurangi kemiskinan 0,5 persen. Begitu pula sebaliknya.

Fenomena tersebut mengingatkan para pemangku kebijakan bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan dan pendapatan harus semakin ditingkatkan. Potret kesejahteraan laki-laki dan perempuan sejak sebelum pandemi memang mengalami ketimpangan. Kesejahteraan perempuan tidak lebih baik dibandingkan laki-laki. Menurut Auzar (2020), dari berbagai dimensi seperti pendidikan, ketenagakerjaan, air bersih dan telekomunikasi kepala keluarga perempuan lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki. Hanya indikator persentase rumah dengan luas lantai >7,2 m2 per kapita dan pengeluaran perkapita per bulan kondisi kaum perempuan lebih baik.

Perempuan di sektor wisata

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak 2 tahun terakhir memukul berbagai sektor ekonomi seperti pariwisata. Sektor pariwisata yang memang mendatangkan banyak orang bertentangan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu mencegah kerumunan. Tak pelak, banyak destinasi wisata yang terpaksa ditutup selama pandemi. Pandemi inilah yang juga melahirkan tren protokol pariwisata baru yaitu *Cleanliness, Health, Safety and Environtment Sustaibnability* (CHSE). Mau tidak mau setiap pelaku wisata harus memenuhi protokol tersebut untuk menjamin keberlangsungan destinasi wisata.

Melonjaknya kasus Covid-19 secara drastis dalam periode tertentu, memaksa pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan penutupan destinasi wisata. Penutupan ini terpaksa dilakukan untuk mencegah penambahan kasus baru yang lebih parah akibat wisatawan dari luar daerah atau wisatawan lokal. Padahal, keberlangsungan sebuah destinasi wisata sangat tergantung pada jumlah wisatwan yang datang ke lokasi wisata.

Pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata yang berbasis pada komunitas, tentunya harus ramah terhadap partiwipasi masyarakat lokal khususnya perempuan. Pada tahun 2007, UNWTO memberikan sebuah *awareness* melalui kampanye di hari pariwisata sedunia bertajuk *"Tourism Opening Doors For Women"*. Melihat *awareness* tersebut, tentunya dunia sudah mengakui bahwa keterlibatan perempuan penting dalam hal kepariwisataan. Meskipun lingkup partisipasi perempuan

masih banyak berada di sektor domestik daripada level *decision making* (*Women in Tourism Indonesia*, 2020).

Berbeda dengan perempuan, peran laki-laki di sektor pariwisata lebih dominan dan bervariasi seperti pengambil keputusan, pekerja terampil, berkompetensi teknis, dan mampu menjadi pemimpin. Namun pada kenyataannya pekerjaan administratif yang dianggap selaras tersebut juga banyak dilakoni oleh laki-laki yang dinilai lebih cekatan dalam bekerja. Praktis, hal ini memunculkan stereotip bahwa perempuan merupakan pekerja sekunder, tidak terampil, berfisik lemah, tidak mempunyai kompetensi teknis dan tidak mampu mengemban tugas sebagai pemimpin (Setya Arum, *Pariwisata dan Gender*, 2020).

Apa yang dialami pekerja perempuan di sektor pariwisata tersebut menandakan masih adanya ketidakadilan gender. Hari ini, sebenarnya kualitas dan kuantitas pekerja perempuan meningkat cukup baik. Pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibanding laki-laki. Namun tuntutan keadilan hak atas perolehan upah atau gaji yang setara dengan laki-laki belum berhasil (Arum, 2020). *Global Report on Women in Tourism* (2019) oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) menyatakan, mayoritas tenaga kerja Indonesia di sektor pariwisata adalah perempuan dengan persentase 54 persen. Namun, perempuan menerima upah 14,7 persen lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki untuk strata pekerjaan yang sama.

Ketimpangan upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki di sektor pariwisata ini bukan tanpa alasan. Steorotip peran perempuan yang masih dianggap di ranah domestik sering dibenturkan dengan sektor pariwisata yang berada pada ranah publik. Ranahnya laki-laki. Kondisi tersebut juga menyebabkan perempuan terjerembab pada jenis pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan tinggi seperti adminsitrasi dan *food beverages* yang selaras dengan pekerjaan domestik. Mereka juga cenderung bekerja di sektor informal dan paruh waktu. Sekedar upaya menyambung hidup.

Ditengah upayanya untuk memperjuangkan keadilan gender dengan laki-laki di sektor pariwisata, datanglah pandemi Covid-19 yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Sub sektor pariwisata seperti akomodasi-hotel, travel agent, MICE, restoran, transportasi wisata dan atraksi wisata, dengan tenaga kerja perempuan yang tidak sedikit sangat terasa dampaknya. Mereka mengalami penurunan pendapatan secara drastis bahkan banyak juga yang sampai kehilangan pekerjaan.

Tidak berhenti disitu, sektor pariwisata juga masih banyak yang belum ramah perempuan. Sebagai *hospitality industry*, pariwisata memang mengutamakan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Perempuan yang bekerja di sektor ini acapkali dituntut memuaskan pelanggan tetapi seringkali kurang baik seperti *sexual harassment*.

Keberdayaan Gender: solusi feminisasi kemiskinan?

Di tengah tantangan membangun kesetaraan dan keberdayaan gender di sektor pariwisata, kebijakan Bupati Trenggalek yang sangat menaruh perhatian pada perempuan patut mendapatkan dukungan penuh dari semua stakeholder. Sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021-2026, pada tahun 2026 target 100 desa wisata ditetapkan. Pariwisata, khususnya desa wisata diharapkan menjadi resep jitu *economics recovery* dari pandemi. Selebihnya, Cattarinich (2001, dalam Manwa: *Enhancing Participation Women in Tourism*, 2008) menjelaskan bahwa pariwisata dapat menjadi mesin untuk pembangunan ekonomi bagi negara berkembang, terutama di daerah yang tertinggal dan didominasi oleh masyarakat perempuan.

Sebagaimana sambutan Bupati Trenggalek dalam beberapa event, terselip narasi pelibatan perempuan dalam pengembangan desa wisata disamping konsentrasinya untuk memberdayakan juga kelompok rentan dan perlindungan anak. Menurut beliau, perempuan lebih bisa mengelola keuangan dengan baik dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga lebih bisa menjamin gizi keluarga sehingga kebutuhan nutrisi terpenuhi. Perempuan juga lebih pintar menyisihkan pendapatannya untuk pendidikan anak. Ujung-ujungnya adalah meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Desa wisata, dalam perspektif *ecotourism*, juga sangat terkait dengan perempuan. Perempuan lebih memiliki ikatan dengan alam dibanding laki-laki seperti berladang dan berkebun. *Ecotourism* juga menerapkan prinsip yang tidak merusak lingkungan, aware terhadap iklim yang berkelanjutan, resource berasal dari masyarakat lokal dan harus ada keterlibatan masyarakat khususnya perempuan.

Jika ditilik kembali tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam ecotourism, jawaban rasional ada di riset Deshingar, 1994: dalam Scheyvens, *Promoting Women's Empowerment through Involvement*

in Ecotourism: Experiences from the third world, 2000. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekowisata telah membawa perempuan dalam upaya preservasi budaya dan lingkungan seperti penanaman pohon dan pengajaran budaya lokal pada wisatawan.

Keberdayaan perempuan secara nyata juga mampu menurunkan angka kemiskinan (Studi kasus Provinsi Jatim). Peningkatan IDG bukan semata-mata meningkatan angka-angka kuantitatif tetapi harus terbukti secara empiris. Pelibatan perempuan secara adil dalam peran gender di bidang pariwisata, khususnya desa wisata, diharapkan mampu menaikkan taraf ekonomi. Tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan. Peningkatan akses pendapatan perempuan merupakan faktor kunci tetapi bukan satu-satunya. Peningkatan akses perempuan di bidang kesehatan dan pendidikan juga harus mendapatkan keberpihakan pemerintah.

Peningkatan akses pendapatan, pendidikan dan kesehatan bagi perempuan juga tidak akan berarti apa-apa jika budaya patriarkis masih membayangi. Stigma yang masih meng-subordinasi, men-diskriminasi, me-marginalisasi, dan membelenggu perempuan hanya di ranah domestik harus perlahan dihilangkan.

Sebagai orang Jawa, kita kembalikan lagi kepada makna rumah tangga dalam budaya Jawa yang merupakan ruang yang tersambung dengan ranah sosial (publik). Kaitannya dengan desa wisata, perempuan harus lebih diberdayakan tidak hanya pada bagian-bagian domestik seperti *food and beverage* tetapi juga harus diberi kesempatan berkecimpung di manajemen bahkan sampai menjadi pucuk pimpinan kelembagaan wisata seperti Pokdarwis. Jika riset di berbagai daerah terbukti memberdayakan perempuan mampu menurunkan kemiskinan, relatif ramah lingkungan, dan menjamin investasi pendidikan dan kesehatan anak. Maka tunggu apa lagi?